

**ANALISIS DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI, KESENJANGAN
ANTAR DAERAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP KESEJAHTERAAN
DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

RINA ANGGRAINI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS DAMPAK PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KESENJANGAN ANTAR DAERAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP KESEJAHTERAAN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Rina Anggraini

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pertumbuhan ekonomi , kesenjangan antar daerah dan tenaga kerja terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung. Data yang digunakan adalah data sekunder runtun waktu (*time series*) selama periode 2000 - 2014. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan uji asumsi klasik, hipotesis, dan *Ordinary Least Square* (OLS) dengan menggunakan alat analisis Eviews 8. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung. Sedangkan variabel kesenjangan antar daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung. Dari penelitian ini selain memberikan hasil estimasi juga dapat menyimpulkan beberapa langkah kongkrit yang harus dilakukan pemerintah berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintah harus lebih memperhatikan beberapa aspek terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat yang lebih baik.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF IMPACT OF ECONOMIC GROWTH, REGIONAL INEQUALITY, AND LABOR TO THE PUBLIC WELFARE IN LAMPUNG PROVINCE

By :

Rina Anggraini

This research aims to find out the impact of economic growth, regional inequality, and labor to the welfare in Lampung Province. Secondary data is used in time series during period 2000-2014. The method used the classical assumption approach, hypothesis, and ordinary least squares (OLS) by using Eviews 8 tools. The result show that variables of economic growth and labor has significant and positive effect to the welfare in Lampung Province. On the other hand, regional inequality has not affect to welfare in Lampung Province. From this research besides give result also include some concrete steps that must be conducted by government relate to increase welfare. For supporting the public welfare the government should pay more attention to some aspects especially on the aspect of health, education, and increasing social income.

Keywords : The economic growth, regional inequality, labor and public welfare.

**ANALISIS DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI, KESENJANGAN
ANTAR DAERAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP KESEJAHTERAAN
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

RINA ANGGRAINI

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

**: ANALISIS DAMPAK PERTUMBUHAN
EKONOMI, KESEJAJARAN ANTAR
DAERAH DAN TENAGA KERJA
TERHADAP KESEJAHTERAAN DI
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Rina Anggraini

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1211021099

Jurusan

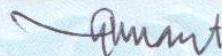
: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

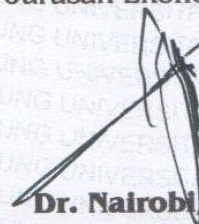
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.
NIP 9560325 198303 1 002

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

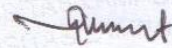


Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.



.....

Penguji Utama : Zulfa Emalia, S.E., M.Sc.



.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Juni 2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku.”

Bandar Lampung, 10 Juni 2016

Penulis



Rina Angraini

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Natar pada tanggal 17 Januari 1994, sebagai anak kelima dari pasangan Bapak Hermanto dan Ibu Nurhaida.

Penulis memulai pendidikannya di SD N 1 Sarirejo Natar, Lampung Selatan.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Yadika Natar yang diselesaikan pada tahun 2009. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di SMA Negeri 1 Natar yang selesai pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, Penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung.

Motto :

“There is no limit of struggling, Don't lose the faith, keep praying, keep trying”

(Rina Anggraini)

"Jika kita tidak berubah, kita tidak akan bertumbuh, jika kita tidak bertumbuh, kita belum benar-benar hidup"

(Call Sheehy)

PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat, nikmat dan kasih-Nya yang tiada pernah berhenti diberikan kepadaku selama ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

Orang tuaku : Babe dan Mamah, yang selalu memberikan segalanya, yang telah membesarkan dan mendidikku dengan cinta kasihnya.

Untuk semua orang yang selalu berusaha dengan sungguh sungguh dan tak pernah putus berdoa untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik.

Untuk almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas kasih karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi dengan judul “*Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan antar daerah dan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan di Provinsi Lampung*” ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu Ilmu Ekonomi di Universitas Lampung. Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Bimbingan, keteladanan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh penulis mempermudah proses pembelajaran tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pelajaran, motivasi dan bimbingan yang sangat berharga bagi Penulis.
5. Bapak Thomas Andrian, S.E., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
7. Staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Hudaiyah, Mas Ferry, Mas Ma'ruf dan yang telah banyak membantu.
9. Kedua orang tuaku, Babe Hermanto dan dan Ibu Nurhaida yang telah memberikanselalanya demi kebaikanaku.
10. Kakak dan adikku Rosi Hernovida, Roni Andika Putra, Liza Gusfita, Reno Nofianto, dan Firdon Hermansyah yang telah memberikan dukungan serta doa yang tak pernah putus.
11. Seluruh keluarga besarku tercinta yang telah memberikan semangat tiada henti.
12. Sahabat-sahabatku, Ririn Wuryani, Danang Jatu Prayogi, Rini Lidya Sari, Corry Mustika Intan, Anna Paula.yang selalu memberikan semangat dan menghiburku selama menyusun skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku semasa berjuang di kampus tercinta, Rizka Mardela Okta Putri, Frisca Dewi, Yoka Ardoa Swardhinidi, Rini Novia Napitupulu, Agus Kornu Tina Wati, Istiningdiah, dan Devani Ariestha Sari yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu ada disaat susah, senang, beruntung punya kalian.

14. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2012 Medi Tantra, Muhammad Jefri Saputra, Danti, Hara Regina Simamora, Mutiara Dewi Prawaka, Devina Octarrum, Puspa Ayu, Vivi Ningtiahsari, Aprida Aditya, Epsi Trismelia, Handicky Julius, M. Alyuriza Syalkahfi, Khanif, Anto Kurniawan dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 10 Juni 2016
Penulis

Rina Angraini

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Hipotesis	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis	18
1. Pertumbuhan Ekonomi	18
2. Kesenjangan Antar Daerah.....	21
2.1 Ukuran Kesenjangan Antar Daerah.....	27
3. Tenaga Kerja	31
4. Kesejahteraan.....	35
5. Hubungan Antara Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen	38
B. Tinjauan Empiris	40
1. Penelitian Terdahulu	40
 III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sumber Data	46
B. Definisi Operasional Variabel	46
C. Analisis Kesenjangan Antar Daerah.....	47

D. Metode Analisis	49
1. Alat Analisis	49
2. Pengujian Asumsi Klasik	50
a. Uji Normalitas.....	50
b. Uji Multikolinieritas.....	50
c. Uji Autokorelasi.....	51
d. Uji Heteroskedasitas	51
E. Uji Statistik	52
1. Uji Hipotesis/Uji t (Parsial).....	52
2. Uji F-statistik.....	53

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	54
1. Kesejahteraan.....	54
2. PerkembanganPertumbuhan Ekonomi di Lampung	56
3. Perkembangan Kesenjangan Antar Daerah di Lampung.....	57
4. Perkembangan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung	59
B. Analisis Data	60
1. Pengujian Asumsi Klasik.....	60
a. Uji Statistik.....	63
b. Pembahasan Hasil Penelitian	65

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nilai IPM Menurut Provinsi Se-Sumatera	7
2. Perkembangan PDRB Provinsi Se-sumatera Atas Dasar Harga Konstan	10
3. PDRB Kabupaten/kota Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan..	12
4. Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Lampung	12
5. Penelitian Terdahulu	40
6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Periode 2000 - 2014	55
7. Perkembangan PDRB Provinsi Lampung dan Pertumbuhan Ekonomi ..	56
8. Indeks Williamson di Provinsi Lampung	57
9. Perkembangan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung.....	59
10. Hasil Uji Normalitas.....	60
11. Hasil Uji Multikolinearitas	61
12. Hasil Uji Autokorelasi.....	62
13. Hasil Uji Heteroskedasitas	63
14. Hasil Uji t-Statistik Variable Pertumbuhan Ekonomi	63
15. Hasil Uji t-Statistik Variable Kesenjangan Antar Daerah.....	64
16. Hasil Uji t-Statistik Variable Tenaga Kerja	64
17. Hasil Uji F-statistik	65
18. Hasil Estimasi Regresi.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	15
2. Kurva Lorentz	31
3. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Ketenagakerjaan.....	34

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 menyatakan bahwa pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tataran global, “Deklarasi Millennium” yang ditandatangani di New York Tahun 2000 juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelum Tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan capaian pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan menetes sendiri (*trickle down effect*) terhadap lapangan pekerjaan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat demi terciptanya distribusi pendapatan. Fakta yang terjadi adalah beberapa negara berkembang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi

yang tinggi, namun gagal memperbaiki taraf hidup (kesejahteraan) masyarakatnya (Todaro, 2009).

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk daerah yang bersangkutan. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat, rendahnya kesenjangan antar daerah dan pengangguran dapat diminimalisir dari daerah yang bersangkutan.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak hanya ditandai oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meratanya distribusi pendapatan dan banyaknya penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan penduduk menyebabkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diminimalisir dari daerah yang bersangkutan (Elizabeth, 2007).

Proses pemerataan kesejahteraan penduduk tentunya bukan perkara yang gampang mengingat sulitnya indikator-indikator yang harus dipenuhi agar kesejahteraan penduduk dapat tercapai. Masalah yang seringkali ditemui dalam proses pembangunan suatu daerah adalah ketidakserasian antara pertumbuhan

ekonomi dengan distribusi pendapatan, *Trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi.

Kuznet mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk atau yang lazim disebut dengan ketimpangan yang tinggi (Kuncoro, 2003).

Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu provinsi adalah unsur utama dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan.

Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan *output* dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau penduduk itu dapat memperoleh pekerjaan, maka hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Tetapi jika tidak memperoleh pekerjaan berarti mereka akan menganggur, dan justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah.

Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan yang lebih besar kepada negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Tetapi sejauh mana kebutuhan ini dipenuhi tergantung pada kemampuan negara atau pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di antara masyarakat dan distribusi pendapatan serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan sarana utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan manusia yang secara empirik terbukti merupakan syarat perlu bagi pembangunan manusia. Dalam hal ini ketenagakerjaan merupakan jembatan utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapabilitas manusia (Artana, 2010).

Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Pada dasawarsa yang lalu, masalah pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri.

Untuk menilai keberhasilan pembangunan, ada syarat yang diperlukan untuk mengukur atau menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan. Syarat itu harus dimulai dari tingkat pemahaman semua komponen terkait indikator pembangunan serta pengertian penerapan kebijakan dan hasil dari proses pelaksanaan kebijakan.

Grubel (1998) menyatakan bahwa statistik pendapatan nasional yang mengukur kesejahteraan manusia tidaklah sempurna, hal itu telah mendorong United Nations Development Program (UNDP) untuk mempublikasikan setiap tahunnya indikator kesejahteraan sosial untuk 175 negara. Indikator tersebut dikenal dengan *Human*

Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan antarnegara ataupun antar daerah (Todaro, 2009).

IPM telah memainkan dua peran kunci dalam bidang pembangunan ekonomi yang diterapkan: (1) sebagai alat untuk mempopulerkan pembangunan manusia sebagai pemahaman baru tentang kesejahteraan, dan (2) sebagai alternatif untuk PDB perkapita sebagai cara untuk mengukur tingkat pembangunan untuk perbandingan *antarnegara dan antarwaktu* (Elizabeth, 2007).

Indek pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut

1. Produktivitas
2. Pemerataan
3. Kesinambungan
4. Pemberdayaan

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu

negara. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang efektif.

Provinsi Lampung sendiri memiliki IPM paling rendah diantara Provinsi lain di Pulau Sumatera. Data publikasi BPS memperlihatkan Perkembangan Indeks Manusia di Lampung mengalami kenaikan tiap tahunnya tapi keadaan yang sebenarnya dibandingkan dengan provinsi lain, Lampung belum bisa mengungguli daerah-daerah yang ada di Sumatera dan Lampung sendiri memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang rendah dan masih diperlukan usaha yang lebih baik lagi dan hal ini membutuhkan kebijakan yang tepat dari Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia dan pertumbuhan yang digambarkan dalam Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya meningkatkan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang dan diikuti oleh perbaikan sistem kelembangaan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapat (Arsyad, 2010).

Tabel 1. Nilai IPM Menurut Provinsi Se-Sumatera (Persen)

Provinsi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	rata-rata
Aceh	69,4	65,3	66,0	67,4	68,7	69,05	69,41	70,35	70,76	71,31	71,7	72,16	72,51	73,05	68,81	67,4
Sumatera Utara	70,5	66,6	68,8	69,8	71,4	72,03	72,46	72,78	73,29	73,8	74,19	74,65	75,13	75,55	68,87	68,9
Sumatera Barat	69,2	65,8	67,5	68,3	70,5	71,19	71,65	72,23	72,96	73,44	73,78	74,28	74,7	75,01	69,36	69,4
Riau	70,6	67,3	69,1	70,7	72,2	73,63	73,81	74,63	75,09	75,6	76,07	76,53	76,9	77,25	70,33	70,3
Jambi	69,3	65,4	67,1	68,1	70,1	70,95	71,29	71,46	71,99	72,45	72,74	73,3	73,78	74,35	68,24	68,2
Sumatera Selatan	68,0	63,9	66,0	66,8	69,6	70,23	71,09	71,4	72,05	72,61	72,95	73,42	73,99	74,36	66,75	66,9
Bengkulu	68,4	64,8	66,2	68,1	69,9	71,09	71,28	71,57	72,14	72,55	72,92	73,4	73,93	74,41	68,06	68,1
Lampung	67,6	63,0	65,8	66	68,4	68,85	69,38	69,78	70,3	70,93	71,42	71,94	72,45	72,87	66,42	64,7
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	65,4	68,2	69,6	70,68	71,18	71,62	72,19	72,55	72,86	73,37	73,78	74,29	68,27	68,3
Kepulauan Riau	-	-	-	69,1	70,8	72,23	72,79	73,68	74,18	74,54	75,07	75,78	76,2	76,56	73,40	73,4

Sumber : Badan Pusat Statistika Nasional, 2014

Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pemerataan pembangunan setiap daerah. Pembangunan dalam lingkup daerah disamping untuk meningkatkan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah, juga perlu memperhatikan pembangunan manusia. Tingkat pembangunan manusia dapat mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengelola berbagai sumber daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ukuran perkembangan pembangunan manusia menggunakan indikator komposit yaitu IPM, yang tersusun atas indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak (BPS, 2014). Tabel 1 menunjukkan angka IPM Provinsi Lampung adalah yang terkecil dari Provinsi lainnya di Sumatera. Meskipun Lampung merupakan salah satu daerah yang berhasil melakukan peningkatan IPM tetapi Lampung masih terus melakukan pengembangan mutu modal manusia baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun pendapatan masyarakat secara berkelanjutan agar pertumbuhan IPM mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata terdapat daerah dengan pertumbuhan cepat dan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah karena Alesina dan Rodric (dalam Patta, 2012) mengemukakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah pun akan mengalami penurunan.

Provinsi Lampung cukup dikenal sebagai daerah tujuan pariwisata, selain itu juga Lampung memiliki dataran yang bagus untuk ditanami kopi. Meskipun begitu dari 14 kabupaten dan kota di Lampung hanya beberapa daerah saja yang menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi di Lampung. Kecenderungan nilai PDRB tertinggi masih didominasi oleh kota Bandarlampung, terdapat selisih yang cukup besar antara PDRB tertinggi dan terendah. Hal ini menunjukkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cukup tinggi antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Disparitas distribusi investasi antardaerah dapat juga dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan antardaerah. Investor cenderung melakukan investasi pada daerah-daerah maju, karena memudahkan akses pada fasilitas-fasilitas tertentu.

Berdasarkan atas permasalahan tersebut Kuznet (dalam Daryanto, 2012) mengatakan bahwa dalam jangka pendek pertumbuhan pendapatan perkapita dan ketimpangan mempunyai korelasi positif namun korelasi tersebut menjadi negatif dalam jangka panjang. Menurut Lay (dalam Rastiwa, 2013) indikator kesenjangan

wilayah adalah tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi serta ketersediaan sarana prasarana.

Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Penentuan kebijakan kebijakan dalam proses pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan yang adil dan makmur dalam masyarakat.

Menurut Mirza (2012) pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif terhadap IPM, yang berarti pertumbuhan ekonomi semakin tinggi maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Tetapi kesenjangan ekonomi antardaerah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas dengan melihat adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan antar daerah dan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang dinyatakan pada penelitian sebelumnya

Dalam suatu pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah faktor lain, akan tetapi yang paling penting adalah mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdiri atas dasar harga berlaku dan yang digunakan untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi dan atas dasar harga konstan yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh oleh perubahan harga atau inflasi. Pendapatan regional atas dasar harga konstan dapat pula digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah-wilayah lain.

Tabel 2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000 Se-Sumatera 2000-2014 (Rupiah)

Provinsi	2000	2004	2008	2014
1. Aceh	4.995,04	5.532,81	6.296,28	2.3199,49
2. Sumatera Utara	5.848,08	6.777,27	8.263,33	30.482,59
3. Sumatera Barat	5.387,67	6.139,12	7.419,04	25.963,24
4. Riau	5.746,47	6.842,40	8.187,94	72.331,01
5. Jambi	3.502,55	3.898,11	4.636,13	36.088,83
6. Sumatera Selatan	4.505,61	5.067,82	6.199,19	30.627,55
7. Bengkulu	3.344,62	3.780,38	4.460,48	19.631,40
8. Lampung	3.404,59	3.887,37	4.555,94	23.648,76
9. Kep. Bangka Belitung	7.168,13	7.843,75	8.387,91	32.868,70
10. Kepulauan Riau	--	21.065,58	22.952,33	76.753,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2014

Tabel 2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Se-Sumatera dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa Provinsi Lampung tidak berada pada urutan terendah tetapi terjadi sebaliknya di nilai indeks pembangunan manusia bahwa Lampung menempati urutan terakhir Se-sumatera. Hal ini terjadi karena Lampung tidak mengalami pertumbuhan secara menyeluruh misalnya pertumbuhan perekonomian hanya terjadi di seluruh sektor lapangan usaha di bidang pertanian, kehutan dan perikanan memiliki pertumbuhan tertinggi tahun 2014. Selanjutnya diikuti dengan perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto yang meningkat setiap tahunnya. Dengan membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor antar daerah akan dapat pula mengukur kemajuan yang telah dicapai setiap daerah, sehingga prioritas pembangunan masing-masing daerah dapat diketahui.

Thee Kian Wie (dalam Hartono, 2008) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi, ketimpangan pembangian pendapatan antargolongan penerima pendapatan (*size distribution oncome*), ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan, dan ketimpangan pembagian pendapatan antardaerah.

Menurut Basri (dalam Sasana, 2009) distribusi pendapatan nasional menunjukkan merata atau tidaknya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Misalnya untuk kasus di Indonesia, menurut Sakamoto (2006) distribusi pendapatan antar provinsi atau antar-kabupaten/kota menunjukkan kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Fleisher (2009) mengatakan bahwa faktor penentu kesenjangan antarwilayah meliputi investasi modal fisik, modal manusia, dan modal infrastruktur. Salah satu indikator yang biasa dan dianggap cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan/disparitas pendapatan antar daerah adalah indeks ketimpangan daerah yang dikemukakan *Jeffrey G. Williamson* (Arsyad, 2010).

Penelitian Simon Kuznet menemukan sebuah pola yang berbentuk U terbalik terkait dengan kesenjangan antar wilayah. Pola tersebut menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, proses pertumbuhan diikuti oleh semakin memburuknya distribusi pendapatan dan setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan (Hartono, 2008).

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000 Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung Tahun 2000-2014 (Rupiah)

Nama Kabupaten	Tahun			
	2000	2004	2008	2014
Lampung Barat	998.093,14	1.123.085,30	1.351.526,36	1.135,729
Tanggamus	2.247.475,88	2.641.905,69	2.103.899,46	2.667,036
Lampung Selatan	3.491.854,76	3.987.720,13	3.908.442,23	4.906,268
Lampung Timur	2.768.737,00	3.541.812,45	3.947.096,57	4.811,393
Lampung Tengah	3.586.564,94	4.446.178,23	5.553.009,63	7.006,637
Lampung Utara	2.048.641,48	2.423.303,83	3.017.662,92	3.781,781
Way Kanan	909.623,36	1.067.102,79	1.275.966,82	1.570,458
Tulang Bawang	2.947.619,24	3.437.440,69	4.357.683,14	2.548,776
Pesawaran	-	-	1.491.042,50	1.887,427
Pringsewu	-	-	1.286.706,15	1.538,923
Tulang Bawang Barat	-	-	934.535,67	1.277,650
Mesuji	-	-	1.036.542,00	1.405,713
Bandar Lampung	3.615.027,30	4.549.462,97	5.802.307,55	7.423,369
Metro	338.454,80	408.799,63	504.392,60	634.245,89
Pesisir Barat	-	-	-	547,164

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah meningkatkan pendapatan. berikut penyajian data ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menggunakan batasan umur 15 tahun ke atas dari semua.

Tabel 4. Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Lampung (Jiwa)

Tahun	Penduduk	Usia Kerja	Angkatan Kerja	Bekerja	Menganggur
2000	6.678,415	4.430,215	3.478,791	3.361,128	259,150
2001	6.724,052	4.590,431	3.731,869	3.466,784	265,085
2002	6.787,654	4.643,848	3.932,932	3.620,103	265,085
2003	6.852,998	4.727,590	4.113,736	3.780,202	333,534
2004	6.915,951	4.808,534	4.303,123	3.947,383	355,740
2005	6.983,676	4.895,054	4.488,878	4.121,958	366,920
2006	7.504,834	4.950,973	4.587,186	4.211,861	375,325
2007	7.127,056	5.007,712	4.687,646	3.281,351	317,674
2008	7.391,128	5.248,138	3.568,770	3.313,553	255,167
2009	7.500,674	5.351,935	3.627,155	3.387,175	240,110
2010	7.500,674	5.367,848	3.686,346	3.462,297	224,049
2011	7.691,007	5.426,127	3.761,621	3.547,030	214,591
2012	7.691,097	5.523,672	3.632,415	3.616,574	215,841
2013	7.932,132	5.557,295	3.711,931	3.385,046	189,251
2014	8.100,967	5.690,989	3.832,123	3.505,089	206,844

Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Lampung, 2014

Tabel 4 menunjukkan orang yang bekerja di Provinsi Lampung tahun 2000 – 2011 terus meningkat tetapi menurun pada tahun 2011 menjadi 3.547,030 dan meningkat lagi menjadi 3.616,574 di tahun 2012 dan menurun lagi di tahun 2013 menjadi 3.385,046 dan meningkat menjadi 3.505,089 di tahun 2014.

Transformasi sosial dapat dilihat dari adanya pendistribusian kemakmuran melalui pendapatan dan pemerataan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.

Transformasi budaya, biasa dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada moralitas menjadi penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Secara umum dapat dipahami bahwa pembangunan adalah perubahan sosial, sedangkan perubahan sosial tidak selalu identik dengan pembangunan. Dalam konteks ini, pembangunan adalah perubahan yang direncanakan, disengaja dan diinginkan untuk mencapai tujuan tertentu (Ayu, 2010).

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang Kesejahteraan. Selain itu di dalam penelitian ini juga akan dilihat bagaimana pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah, Tenaga Kerja. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan antar daerah dan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan di Provinsi Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil untuk penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pengaruh kesenjangan antar daerah terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah, dan tenaga kerja secara bersama-sama terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

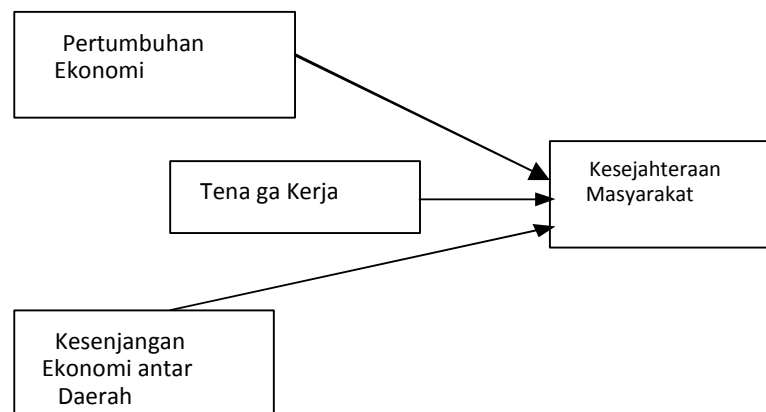
1. Untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung.
2. Untuk menganalisis kesenjangan antar daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung.
3. Untuk menganalisis tenaga kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung.
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah, dan tenaga kerja secara bersama-sama terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dalam menambah wawasan dan sebagai salah satu sumber informasi.
3. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian dengan topik atau bidang yang sama.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian studi pustaka dan penelitian terdahulu serta untuk memudahkan dan memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan dapat kita lihat dengan kerangka pemikiran diatas sebagai suatu ukuran pembangunan manusia untuk mencapai SDM potensial dengan cara meningkatkan harapan hidup,

tingkat pendidikan dan meningkatkan standar hidup layak. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan jumlah (volume) barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan perbaikan distribusi (pemerataan) . Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antar daerah adalah dengan menggunakan Indeks Williamson yaitu dengan menggunakan data variabel jumlah penduduk dan pendapatan perkapita. Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota dapat disebabkan oleh: Pertama, adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Kedua, adanya perbedaan kualitas sumber daya yang dimiliki, meliputi tanah, minyak dan gas , hutan, air dan bahan mineral lainnya. Ketersediaan sumber daya alam tersebut bagi suatu daerah merupakan sumber bagi pendapatan daerah tersebut. Sumber daya manusia potensial akan menciptakan kualitas tenaga kerja yang melahirkan produktifitas tinggi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia potensial juga akan mempengaruhi tenaga kerja yang akan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan memiliki sumber daya yang baik dan sinergi dari semua unsur pembangunan manusia tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Hipotesis

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.
2. Diduga kesenjangan ekonomi antar daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

3. Diduga tenaga kerja berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari:

BAB I : Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka berisi landasan teori penelitian, tujuan teoritis, dan tujuan empiris yang relevan dalam penulisan penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian yang terdiri dari tahapan penelitian, sumber data, batasan perubah variabel dan metode analisis.

BAB IV : Hasil dan pembahasan yang memuat hasil olah data serta pembahasan dari hasil hitung statistik.

BAB V : Kesimpulan dan saran, yang memuat kesimpulan dan seluruh kegiatan penelitian serta saran untuk pengembangan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi akan tergantung dalam penambahan penyedia faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal serta tingkat kemajuan teknologi). Pandangan ini didasari oleh anggapan klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pekerjaan penuh (*full employment*), dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar (Pressman, 2000). Dari kedua faktor ini pertumbuhan produktivitas jelas lebih penting, karena seperti yang ditunjukkan oleh Adam Smith, pertumbuhan produktivitas inilah yang menghasilkan peningkatan dalam standar kehidupan. Kuznets sangat menekankan pada perubahan dan inovasi teknologi sebagai cara meningkatkan pertumbuhan produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang

produktif yaitu pertanian ke sektor yang lebih produktif yaitu industri manufaktur. (Todaro, 2009) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah :

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Menurut teori Klasik, akumulasi modal serta jumlah tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Smith menyebut ada tiga unsur pokok dalam produksi suatu negara, yaitu :

- a. Sumber daya yang tersedia, yaitu tanah.
- b. Sumber daya insani, yaitu jumlah penduduk.
- c. Stok barang modal yang ada. Ada beberapa faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: peranan sistem pasaran bebas, perluasan pasar, spesialisasi dan kemajuan teknologi.

(Pressman, 2000) Pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus tetapi mengalami keadaan dimana ada yang berkembang dan pada yang lain mengalami kemunduran. Masalah tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini investasi akan dilakukan, dan penambahan investasi ini akan meningkatkan

kegiatan ekonomi. Proses multiplier yang ditimbulkannya akan menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam kegiatan ekonomi dan perekonomian mengalami pertumbuhan yang lebih pesat.

Dalam teori basis ekonomi (*economic base theory*) disebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut, kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pertumbuhan ekonomi menurut Simon Kuznet adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyaknya jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan ekonomi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Definisi di atas memiliki tiga komponen pengertian: Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang (Todaro, 2009). Kedua, teknologi maju merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah/provinsi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDRB dan

bukan indikator lainnya seperti misalnya, pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator pertumbuhan. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian dalam suatu daerah/provinsi. Hal ini berarti peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
- b. PDRB dihitung atas dasar konsep aliran (*flow concept*), artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada satu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran guna menghitung PDRB, memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
- c. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah suatu provinsi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah daerah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

2. Kesenjangan Antar Wilayah

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (*disparity*). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal dari pada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian

masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi -ketimpangan (Hartono, 2008).

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*) (Sjafrizal, 2008).

(Kuncoro, 2003) kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat, sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda.

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008).

Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu,

bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf u terbalik.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Williamson pada tahun 1965 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik yang diformulasi secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2008).

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah- daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan

solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2009).

Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur dalam melihat ketimpangan pembangunan suatu wilayah. Selain itu pendapatan perkapita juga banyak digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan wilayah bukan dari tingginya pendapatan tetapi bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi secara merata.

Kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Akibat dari perbedaan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana setiap daerah biasanya terdapat wilayah *relative* maju (*developed region*) dan wilayah *relative* terbelakang (*underdeveloped region*).

Terjadinya kesenjangan antarwilayah ini selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. Biasanya implikasi yang ditimbulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat. Karena itu, aspek kesenjangan ekonomi antarwilayah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah (Sjafrizal, 2008).

Faktor-faktor penyebab kesenjangan antar wilayah adalah:

1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar

daerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi tinggi cenderung tumbuh pesat dibandingkan daerah yang tingkat konsentrasi ekonomi rendah cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

2. Alokasi Investasi

Berdasarkan teori Pertumbuhan Ekonomi dari Harrod Domar menerangkan bahwa adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya rendahnya investasi disuatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi yang produktif.

3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah Antarwilayah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital antarwilayah merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hubungan antara faktor produksi dan disparitas pembangunan atau pertumbuhan antarwilayah dapat di jelaskan dengan pendekatan mekanisme pasar. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan perbedaan pendapatan perkapita antarwilayah dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output atau input bebas.

4. Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) Antarwilayah

Menurut kaum klasik pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin SDA. Dalam arti SDA dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan selain itu diperlukan faktor-faktor lain yang sangat penting yaitu teknologi dan SDM.

5. Perbedaan Kondisi Demografi Antar Wilayah

Disparitas (ketimpangan) Ekonomi Regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antarwilayah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Dilihat dari sisi permintaan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran jumlah populasi yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin yang tinggi, etos kerja tinggi merupakan aset penting bagi produksi.

6. Kurang Lancarnya Perdagangan Antar Wilayah

Kurang lancarnya perdagangan antardaerah (intra-trade) merupakan unsur menciptakan ketimpangan ekonomi regional. Tidak lancarnya Intra-trade disebabkan : Keterbatasan transportasi dan komunikasi. Tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan : kelangkaan akan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan pasar terhadap kegiatan ekonomi lokal yang sifatnya komplementer dengan barang jasa tersebut. Sisi penawaran, sulitnya mendapat barang modal, input antara, bahan baku atau material lain yang dapat menyebabkan kegiatan ekonomi suatu wilayah akan lumpuh dan tidak beroperasi optimal.

(Kuncoro, 2003) mengemukakan kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno,2006).

2.1 Ukuran Kesenjangan Antar Daerah

Syafrizal (2008) mengemukakan bahwa penetapan ukuran disparitas sangat penting, karena dalam melihat disparitas pembangunan antarwilayah di suatu negara atau suatu daerah bukanlah hal yang mudah karena dapat menimbulkan silang pendapat yang berkepanjangan, dimana satu pihak berpendapat bahwa disparitas suatu daerah cukup tinggi dilihat dari banyaknya kelompok miskin di daerah yang bersangkutan, namun di pihak lain, ada pendapat bahwa ketimpangan suatu daerah cukup tinggi dilihat dari segelintir kelompok kaya yang berada ditengah masyarakat yang mayoritas masih miskin.

a. Indeks Williamson

Indeks Williamson lazim digunakan dalam pengukuran ketimpangan pembangunan antarwilayah. Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai ketimpangan regional (*regional inequality*) sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat (Sjafrizal, 2008).

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan

IW = Indeks Williamson

f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke- i (jiwa)

n = Jumlah penduduk (jiwa)

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota ke- i (Rupiah)

Y = PDRB per kapita rata-rata (Rupiah)

Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Lampung adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

b. Indeks Theil

Indeks lainnya yang lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah Theil Index. Data yang digunakan dalam indeks Theil ini sama halnya dengan data yang digunakan dalam indeks Williamson. Demikian pula halnya dengan penafsirannya yang juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. Formulasi Theil index () adalah sebagai berikut (Sjafrizal, 2012).

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left\{ \frac{y_{ij}}{Y} \right\} \log \left[\frac{y_{ij}}{Y} / \frac{n_{ij}}{N} \right]$$

Di mana: y_{ij} = PDRB per kapita kabupaten i di provinsi j

Y = Jumlah PDRB per kapita seluruh provinsi j

n = Jumlah penduduk kabupaten in di provinsi j

N = Jumlah penduduk seluruh kabupaten

Menurut Sjafrizal (2012), penggunaan Theil Index sebagai ukuran ketimpangan ekonomi antarwilayah mempunyai kelebihan tertentu. Pertama, indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Kedua, dengan menggunakan indeks ini dapat pula dihitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan kebijakan yang cukup penting.

c. Indeks Gini

Gini atau lengkapnya Corrado Gini merumuskan suatu ukuran untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan personal secara agregatif yang diterima diatas tingkat tertentu. Hasil temuannya sering disebut sebagai gini coefficient atau indeks gini. Koefisien gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, yang menjelaskan kadar pemerataan pendapatan. Koefisien yang semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya koefisien yang semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin timpang. Angka rasio Gini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas area yang terletak diantara kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga OBC. Semakin melengkung kurva Lorenz, akan semakin luas yang dibagi rasio Gini-nya akan semakin besar, menyiratkan distribusi pendapatan yang semakin timpang. Koefisien Gini juga dapat dihitung secara matematik dengan rumus :

$$G = 1 - \frac{\sum_1^n (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})}{2}$$

Dimana :

G = Koefisien Gini

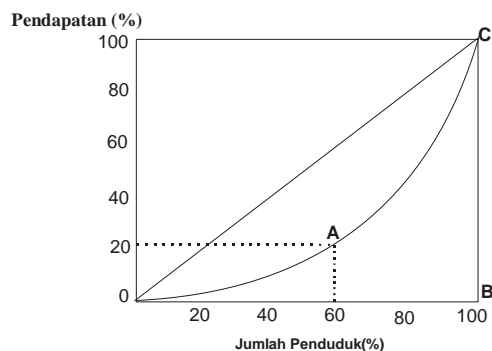
X_i = Proporsi Kumulatif Rumah Tangga dalam Kelas- i

Y_i = Proporsi Kumulatif pendapatan dalam Kelas- i

Todaro (2009), memberikan batasan, bahwa negaranegara yang ketimpangannya tinggi, maka koefisien Gini-nya terletak antara 0,5-0,7. Sedang negara-negara yang ketimpangannya relatif rendah (merata), koefisien Gini-nya terletak antara 0,2-0,35.

d. Kurva Lorez

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak disebuah bujur sangkar yang disisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.



Sumber: Todaro (2009)

Gambar 2. Kurva Lorentz

Keterangan: titik A mencerminkan 60% penduduk berpendapatan terendah menghasilkan atau hanya memiliki 20% pendapatan nasional.

3. Tenaga Kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar (Todaro, 2009). Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif kepada pembangunan ekonominya.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan

demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ekonomi adalah tenaga kerja. Setiap kegiatan produksi yang akan dilaksanakan pasti akan memerlukan tenaga kerja. Tenaga kerja bukan saja berarti buruh yang terdapat dalam perekonomian. Arti tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Dari segi keahlian dan pendidikannya tenaga kerja dibedakan kepada tiga golongan:

- a. Tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.
- b. Tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dari pendidikan atau pengalaman kerja.
- c. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu.

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa kearah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri, pembagian kerja menghasilkan pembagian kemampuan produksi para pekerja, setiap pekerja menjadi lebih efisien daripada sebelumnya. Akhirnya produksi meningkatkan berbagai hal, jika produksi naik, pada akhirnya laju pertumbuhan ekonomi juga akan naik.

Menurut BPS penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai Angkatan Kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam

secara berkelanjutan selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

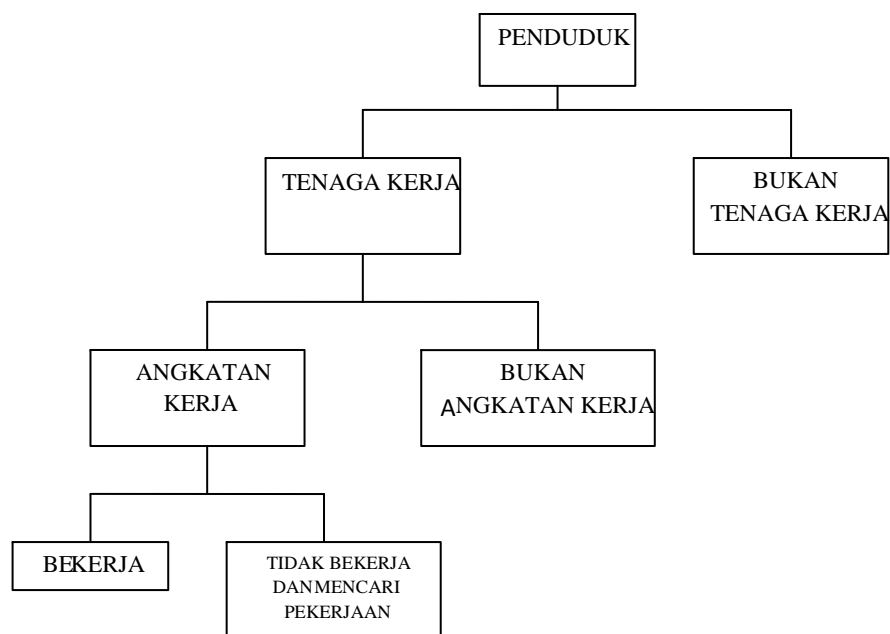
dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2009). Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif kepada pembangunan ekonomi.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia.

Kebutuhan tenaga kerja sangat penting dalam masyarakat karena merupakan salah satu faktor potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Tenaga kerja menjadi sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena dapat meningkatkan output dalam perekonomian berupa produk domestik regional bruto (PDRB). Karena pertumbuhan penduduk semakin besar maka semakin besar juga angkatan kerja yang akan mengisi produksi sebagai input.

a. Teori Ketenagakerjaan

Adam Smith merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal fisik baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.



Gambar 3. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Ketenagakerjaan

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja (*demand for labour*) dan penawaran tenaga kerja (*supply for labour*), pada suatu tingkat upah.

Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa lebih banyaknya penawaran permintaan terhadap tenaga kerja atau lebih banyaknya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja.

b. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja (Todaro, 2009). Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2003). Penduduk yang berkerja terserap dan tersebar diberbagai sektor, namun tiap sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda demikian juga tiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja.

4. Kesejahteraan

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk pada individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu pada komunitas atau masyarakat luas. Tingkat kesejahteraan meliputi pangan, pendidikan, kesehatan, kadang juga dikaitkan dengan kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan dan sebagainya.

a. Teori Kesejahteraan

United Nations Development Programe (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup,

rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. pembangunan manusia pada hakekatnya adalah suatu proses memperbesar pilihan-pilihan manusia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) (UNDP, 1995).

Human Development Index (HDI) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Todaro, 2009) Indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut.

Teori kesejahteraan masyarakat pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu: teori kesejahteraan sosial dan teori kesejahteraan ekonomi. Teori kesejahteraan sosial dapat digolongkan menjadi *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan pada kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*). Tingkat kesenangan berbeda yang dirasakan oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya.

Neoclassical welfare theory mempopulerkan prinsip pareto optimality dalam teori kesejahteraan. Prinsip *pareto optimality* merupakan kondisi tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimum, yang juga merupakan fungsi kesejahteraan dari semua kepuasan individu. Pada hakikatnya, tingkat kesejahteraan secara umum

tidak hanya merujuk pada tingkat kesejahteraan secara ekonomi semata dengan pencapaian kepuasan individu secara maksimal, tetapi juga melibatkan seluruh aspek kehidupan atau lingkungan sosialnya.

Mengemukakan teori ekonomi kesejahteraan secara mikro. Teori ekonomi kesejahteraan mempelajari berbagai kondisi cara penyelesaian dari model ekuilibrium umum. Hal ini memerlukan antara lain adalah alokasi optimal faktor produksi di antara konsumen. Alokasi faktor produksi dikatakan pareto optimal jika proses produksi tidak dapat diatur lagi sedemikian rupa guna menaikkan output suatu komoditi tanpa harus mengurangi output komoditi lain. Karenanya, teori ekonomi kesejahteraan merupakan cara penyelesaian dari model ekuilibrium umum di mana alokasi faktor produksi di antara komoditi didistribusikan secara optimal. Kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan tingkat produktivitas masyarakat.

b. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitasnya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Indikator kesejahteraan suatu daerah diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, dan tingkat produk domestik regional bruto (PDRB). Kesejahteraan suatu wilayah juga ditentukan dari ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam. Kedua sumber daya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan hidup masyarakat. Pendapatan orang kaya (golongan menengah ke atas) akan digunakan untuk dibelanjakan pada barang mewah, emas, perhiasan, rumah yang mahal. Golongan menengah ke bawah yang memiliki karakteristik miskin, kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah, peningkatan pendapatan dapat meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan mereka (Todaro, 2009).

5. Hubungan Antar Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

a. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesejahteraan Masyarakat

Pada tingkat makro, distribusi peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi juga akan memiliki dampak yang kuat pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya diarahkan lebih ke masyarakat miskin akan memiliki dampak yang lebih besar pada pembangunan manusia.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan peningkatan pendapatan yang terjadi, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat. UNDP juga menyatakan bahwa sampai akhir tahun 1990an, pembangunan manusia di Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan PDB akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik (Lilis dan Yohana, 2012).

b. Hubungan Kesenjangan Antardaerah dengan Kesejahteraan Masyarakat

Kesenjangan pembangunan antarwilayah merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kesenjangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan

kondisi geografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur dalam melihat ketimpangan pembangunan suatu wilayah. Selain itu pendapatan perkapita juga banyak digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan wilayah bukan tingginya pendapatan tetapi bagaimana pendapatan itu terdistribusi secara merata. Semakin rendahnya ketimpangan antar kabupaten disuatu provinsi maka semakin sejahteraan provinsi tersebut. Terjadinya kesenjangan/disparitas antarwilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah. (Patta, 2012) mengemukakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah pun akan mengalami penurunan. Sedangkan Patta (2012) dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan negatif antara distribusi pendapatan dengan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.

c. Hubungan Tenaga Kerja dengan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. Pertumbuhan penduduk dan

pertumbuhan tenaga kerja adalah salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan secara langsung meningkatkan kesejahteraan.

B. Tinjauan Empiris

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang bertemakan tentang kesejahteraan telah banyak dilakukan oleh para ahli ekonomi. Penelitian terdahulu bertujuan membandingkan dan memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan yang merujuk dari beberapa studi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

1. Judul	PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
Penulis	Fahmi Rahadian
Tahun	2012
Latar Belakang	Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan bila memenuhi setidaknya-tidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh penghasilan akan semakin besar. Dalam jangka panjang, kesempatan kerja yang tersedia memaksa orang untuk menentukan spesialisasi yang akan meningkatkan produktivitas. Meningkatnya produktivitas, maka uang yang dihasilkan untuk jam kerja yang sama akan lebih besar.
Variabel	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Jumlah Tenaga Kerja
Metode Penelitian	Model analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan analisis data panel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif melalui data

	sekunder dengan data 25 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat serta data runtun waktu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.
Hasil dan Pembahasan	Lampung mulai dikenal luas sejak tahun 1970-an, yaitu di Kampung Kedaung dan Umbul Duren Desa Sukamaju yang saat itu masih termasuk wilayah Kecamatan Telukbetung/Panjang, Lampung Selatan. Home industri ini awalnya merupakan sebagai kegiatan kaum ibu rumah tangga dalam mengisi waktu dan sekedar membuat makanan ringan keluarga yang dilakukan secara turun temurun, jadi kegiatannya hanya sebagai kegiatan sampingan, serta Melinjo/Tangkil saat itu hanya sebagai komoditas pertanian yang dijual dalam bentuk bahan sayuran ke Daerah
Kesimpulan	Berdasarkan hasil estimasi, kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi positif secara signifikan oleh desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggiderajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja suatu daerah, maka akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Judul	PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN ANTARDAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROVINSI BALI
Penulis	I Komang Oka Artana Yasa
Tahun	2010
Latar Belakang	Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang dan diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan
Metode Penelitian	Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Data sekunder tersebut berupa data produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali.
Variabel	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Kesejahteraan Masyarakat 3. Disparitas Pendapatan
Metode Analisis	Disparitas pendapatan antardaerah diukur menggunakan analisis Indeks Williamson yang dikenalkan oleh Jeffrey G. Williamson (Sjafrizal, 2008:107).

Hasil dan Pembahasan	Hasil perhitungan dengan menggunakan Indeks Williamson menunjukkan terjadinya disparitas atau kesenjangan pendapatan antar-kabupaten/kota Provinsi Bali yang ditunjukkan oleh nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0. Meskipun masih terjadi kesenjangan pendapatan antar-kabupaten/kota di Provinsi Bali namun nilai Indeks Williamson memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun dari tahun 2001-2012.
Kesimpulan	Disparitas pendapatan antardaerah provinsi bali yang diukur dengan indeks williamson dalam periode 2001-2012 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,29 yang berarti disparitas tergolong dalam kriteria rendah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan antardaerah. Disparitas pendapatan antardaerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali melalui disparitas pendapatan antardaerah, atau dengan kata lain disparitas pendapatan antardaerah merupakan variabel mediasi dalam pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali.
3. Judul	PENGARUH PERTUMBUHAN INVESTASI, PERTUMBUHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DI PROVINSI BALI
Penulis	Mariana, Made Suyana Utama, Ida Bagus P
Tahun	2014
Latar Belakang	Indonesia adalah negara berkembang yang terus berupaya melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diperlukan investasi untuk membiayai pembangunan. Investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi, sehingga untuk menumbuhkan perekonomian, pemerintah berupaya menciptakan iklim yang dapat menarik investasi. Perkembangan investasi di Provinsi Bali yang ditunjukkan oleh nilai pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) dari tahun 1985 – 2012
Variabel	1. Tenaga Kerja 2. Pertumbuhan Investas
Metode Penelitian	Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali untuk periode waktu dari tahun 1985-2012. Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan struktur perekonomian yang dibangun di Provinsi Bali sangat spesifik serta mempunyai karakteristik tersendiri apabila dibandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia. Perekonomian di

	Bali spesifik karena dibangun dengan mengandalkan industri pariwisata sebagai leading sector, yang mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong terjadinya suatu perubahan struktur perekonomian.
Metode Analisis	Penerapan statistik deskriptif dalam studi ini antara lain perhitungan rata-rata, tabel-tabel, gambar-gambar, dan sebagainya yang dibuat atau dihitung dengan paket program SPSS.
Hasil dan Pembahasan	Provinsi Bali secara ekonomi termasuk memiliki posisi strategis sehingga penelitian mengenai perekonomian Bali juga memiliki daya penting dan strategis. Mengingat posisi strategis pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan letak geografisnya, maka hasil pertumbuhan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat signifikan terhadap penyerapan dan indikator pertumbuhan ekonomi lainnya. Sehingga penelusuran tentang potensi ekonomi dan keterkaitan indikator lainnya dengan mempertimbangkan hubungan kewilayahan penting untuk dilakukan. Jumlah penduduk memiliki potensi positif dalam perkembangan ekonomi. Sumber daya manusia yang besar menjadi sumber tenaga kerja yang potensial bagi pembangunan dan pasar yang baik untuk menyerap produksi ekonomi. Sitanggang dan Nachrowi (2004) telah mendapatkan gambaran perubahan struktur ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Perubahan struktur ekonomi ini jelas membawa pengaruh pada struktur pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitian ini variabel pertumbuhan penyerapan tenaga kerja merupakan variabel mediasi/antara.
Kesimpulan	Sektor pertanian tetap perlu dipertahankan ditengah gencarnya investasi di bidang industri dan jasa, khususnya jasa pariwisata. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi agar perubahan struktur ekonomi tetap dapat dikontrol.
4. Judul	PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI DI INDONESIA
Penulis	Rini Sulistiawati
Tahun	2012
Latar Belakang	Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan

	kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan
Variabel	1. Tenaga Kerja 2. Upah Minimum Rata-Rata
Metode Penelitian	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Populasi penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang berjumlah 33 provinsi. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data berbentuk times series dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dan data cross-section yang terdiri atas 33 provinsi, sehingga merupakan data panel atau pooled the data yaitu gabungan antara data times series (tahun 2006 s.d 2010 = 5 tahun) dengan data cross-section (33 provinsi).
Pembahasan	Pada pengujian analisis jalur, terlebih dahulu diperlukan pengujian tentang data yang akan dimasukkan ke dalam suatu model. Data yang digunakan pada studi ini adalah data sekunder berupa data panel, oleh karena itu tidak diperlukan uji data. Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur sesuai persamaan struktur 1 dan struktur 2 diperoleh hasil bahwa variabel Upah Minimum (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, sedangkan variabel Penyerapan Tenaga kerja (Y_1) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y_2). Koefisien jalur yang merupakan hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam persamaan sebagai berikut: Model1: $Y_1 = -0,39 X_1$ Model 2 : $Y_2 = 0,08 Y_1$ Koefisien jalur dari masing-masing hubungan antar variabel secara rinci.
Kesimpulan	Upah minimum yang diterima tenaga kerja adalah lebih rendah dari kebutuhan hidup yang layak (KHL). Secara nasional dan provinsi, upah minimum pada tahun 2006 hanya dapat memenuhi 85 persen KHL walaupun pada tahun 2010 rata-rata upah minimum di Indonesia telah sama dengan KHL. Tahun 2007 terdapat empat provinsi yang memberikan upah minimum yang nilainya sama dengan KHL terdiri dari provinsi Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat, sedangkan empat provinsi yang memberikan upah diatas KHL yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Papua. Pada tahun 2008 hanya terdapat 5 (lima) provinsi yang memberikan upah minimum dengan nilai yang sama atau lebih besar dari KHL, sementara tahun 2009 hanya tiga provinsi yang memberikan upah minimum lebih besar dari KHL.

5. Judul	ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KESENJANGAN EKONOMI ANTAR WILAYAH DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR)
Penulis	Nanik Safitri
Tahun	2013
Latar Belakang	Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu negara. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Menurut Todaro (2006) pembangunan adalah merupakan suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam stuktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut.
Variabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Kesenjangan Antar Daerah 3. Tenaga Kerja
Metode Penelitian	Pada studi ini digunakan dengan menggunakan data sekunder dengan jenis data adalah panel data. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah dan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Kesejahteraan Masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
Metode Analisis	Model analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel digunakan analisis data panel dengan menggunakan pendekatan fixed effect Model (FEM).
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan variabel kesenjangan ekonomi antar wilayah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan variabel kesenjangan ekonomi antar wilayah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder tahunan 2000-2014. Data sekunder tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, serta dengan mempelajari dan memahami berbagai sumber melalui buku-buku, jurnal penelitian, literatur, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel di dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen merupakan variabel independen, sedangkan variabel endogen terdiri dari variabel dependen. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kesejahteraan (*dependent variable*), Kesejahteraan masyarakat merupakan variabel dependen. Variabel kesejahteraan diproksi dengan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota.
2. Pertumbuhan ekonomi (*independent variabel*) adalah perubahan PDRB per tahun menurut harga konstan.

3. Kesenjangan ekonomi antar daerah (*independent variabel*) merupakan kesenjangan ekonomi antar wilayah (kabupaten/kota) di Lampung, yang diproksi dengan nilai Indeks Williamson masing-masing kabupaten/kota dalam satuan desimal.
4. Tenaga kerja (*independent variabel*) merupakan data sekunder yang berasal dari Biro Pusat Statistik Provinsi Lampung. Adapun yang dimaksud dengan tenaga kerja dalam data ini adalah jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan.

C. Analisis Kesenjangan Antar Daerah

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan regional di Provinsi Lampung, dalam hal ini tendensi pemerataan pembangunan antar Kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan Indeks Williamson. Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mula-mula ditemukan adalah indeks Williamson digunakan dalam studinya pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah coefficient of variation yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah indeks Williamson muncul sebagai penghargaan kepada Jeffery G. Williamson yang mula-mula menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitif terhadap definisi

wilayah yang digunakan dalam perhitungan , namun indeks ini cukup baik digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Berbeda dengan rasio gini yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan, indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Berikut formulasi indeks Williamson;

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - y)^2 f_i/n}}{Y}$$

Keterangan

IW = Indeks Williamson

f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke- i (jiwa)

n = Jumlah penduduk (jiwa)

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota ke- i (Rupiah)

Y = PDRB per kapita rata-rata (Rupiah)

Nilai angka indeks yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau makin merata dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah, apakah ada ketimpangan tinggi, sedang atau rendah. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut :

- Ketimpangan Tinggi jika $IW > 0,5$
- Ketimpangan Sedang jika $IW = 0,35 - 0,5$
- Ketimpangan Rendah jika $IW < 0,35$.

Namun demikian Index Williamson ini mempunyai kelemahan yakni penghitungan ini baru menggambarkan tingkat pendapatan secara global sejauh

mana dan berapa besar bagian yang diterima oleh kelompok yang berpendapatan rendah atau miskin bertambah tidak tampak dengan jelas.

D. Metode Analisis Data

1. Alat Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode menggunakan metode *OLS (Ordinary Least Square)*. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variable bebas terhadap variable terikat digunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Analisis data akan digunakan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada penelitian ini, menggunakan Software yang digunakan dalam menganalisis data yaitu Microsoft Excel 2007 dan kemudian diolah menggunakan E-Views 6, E-Views 8, dengan Kesejahteraan dipengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar daerah dan Tenaga Kerja dengan menggunakan metode OLS, maka diperoleh persamaan model regresi liniernya adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1PE + \beta_2KAD + \beta_3TK + et$$

Keterangan :

Y : Kesejahteraan
 β_0 : Konstanta dari persamaan regresi
 PE : Pertumbuhan Ekonomi
 KAD : Kesenjangan Antar Daerah
 TK : Tenaga Kerja
 e : Error

2. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model estimasi yang telah dibuat tidak menyimpang dari asumsi-asumsi klasik, maka dilakukan beberapa uji antara lain, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual terdistribusi secara normal atau tidak, pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode Jarque-Bera (Gujarati, 2003). Residual dikatakan memiliki distribusi normal jika Jarque Bera $<$ Chi square, dan atau probabilita (p -value) $>$ $\alpha = 5\%$.

Hipotesis masalah normalitas adalah sebagai berikut :

Ho : Jarque Bera stat $<$ Chi square = Terdistribusi dengan normal.

Ha : Jarque Bera stat $>$ Chi square = Tidak berdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah hubungan linier yang terjadi diantara variabel-variabel independen, meskipun terjadinya multikolinearitas tetap menghasilkan estimator yang BLUE. Pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil estimasi (Widarjono, 2007).

Hipotesis masalah multikolinearitas adalah sebagai berikut :

Ho : VIF $>$ 5, terdapat multikolinearitas antar variabel

Ho : VIF $<$ 5, tidak terdapat multikolinearitas antar variabel

c. Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan mengembangkan uji autokorelasi yang lebih umum dan dikenal dengan uji LM atau LM-Test (Gujarati, 2003). Uji LM *test* menjelaskan apabila nilai Chi squared hitung (Obs*R-squared) lebih kecil dari nilai Chi squared kritis pada $\alpha=5\%$ maka tidak bersifat autokorelasi. Sebaliknya apabila Chi squared hitung (Obs*R-squared) lebih besar dari pada Chi squared kritis pada $\alpha=5\%$ dan probabilitas (Obs*R-squared) lebih kecil dari $\alpha=5\%$ maka data bersifat autokorelasi. Gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji serial *Correlation LM test*

H_0 : Obs*R square (X^2 - hitung) < Chi – square (X^2 - tabel), Model terbebas dari masalah autokorelasi.

H_a : Obs*R square (X^2 - hitung) > Chi-square (X^2 - tabel), Model mengalami masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varian diseluruh faktor gangguan. Suatu model regresi dikatakan terkena heteroskedastisitas apabila terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 2003).

Hipotesis masalah heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

H_0 : Obs*R square (χ^2 -hitung) > Chi-square (χ^2 -tabel), Model mengalami masalah heteroskedastisitas.

H_a : Obs*R square (χ^2 -hitung) < Chi-square (χ^2 -tabel), Model terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

E. Uji Statistik

1. Uji T-Statistik (parsial)

Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (Widarjono, 2013). Digunakan uji 1 arah dengan tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis:

Hipotesis 1

Ho : $\beta_1 = 0$ tidak terdapat pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Kesejahteraan

H1 : $\beta_1 > 0$ terdapat pengaruh positif variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Kesejahteraan

Hipotesis 2

Ho : $\beta_1 = 0$ tidak terdapat pengaruh variabel Kesenjangan Antar Daerah terhadap
Kesejahteraan

H1 : $\beta_1 \neq 0$ terdapat pengaruh variabel Kesenjangan Antar Daerah terhadap
Kesejahteraan

Hipotesis 3

Ho : $\beta_1 = 0$ tidak terdapat pengaruh variabel Tenaga Kerja terhadap
Kesejahteraan

H1 : $\beta_1 > 0$ terdapat pengaruh positif variabel Tenaga Kerja terhadap
Kesejahteraan

Kriteria pengambil keputusan :

- Jika nilai t-hitung $>$ nilai t-tabel maka H_0 ditolak atau menerima H_a , artinya variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat.
- Jika nilai t-hitung $<$ nilai t-tabel maka H_0 diterima atau menolak H_a , artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

2. Uji F-Statistik

Uji F statistik dikenal dengan Uji serentak atau Uji model/Uji Anova yaitu uji yang digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dan untuk menguji apakah model regresi yang ada signifikan atau tidak signifikan. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel (Gujarati, 2003).

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ Diduga secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan.

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ Diduga secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan.

Kriteria pengambilan keputusan :

- Jika F-hitung $>$ F-tabel maka H_0 ditolak, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat.
- Jika F-hitung $<$ F-tabel maka H_0 diterima, artinya secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Lampung.
2. Kesenjangan antar daerah di Provinsi Lampung berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa peningkatan kesenjangan antar daerah akan menurunkan kesejahteraan di Provinsi Lampung. Dilihat dari indeks ketimpangan Williamson tingkat disparitas pertumbuhan antar kabupaten di Provinsi Lampung termasuk dalam taraf rendah dengan koefisien rata rata indeks Williamson 0.3 yang artinya pertumbuhan ekonomi belum cukup merata.
3. Tenaga Kerja berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Lampung.
4. Secara bersama sama variabel pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar daerah, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan di Provinsi Lampung.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah daerah tidak hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi diharapkan lebih intensif melakukan pembangunan dengan berbasis manusia (*human development*) dan juga pemerintah harus fokus pada sektor sektor unggulan dari masing masing kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Diharapkan pemerintah dalam programnya disamping mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat pula mampu lebih intensif melaksanakan upaya pemerataan distribusi pendapatan serta pembangunan manusia. Salah satu cara pemerataan mungkin dengan cara menata kembali pemukiman penduduk agar terjadi pemerataan terhadap masing masing kabupaten kota.
3. Diharapkan pemerintah dapat menciptakan peluang yang lebih besar lagi untuk para tenaga kerja di Provinsi Lampung dengan cara meningkatkan investasi swasta. Perusahaan swasta akan memperbesar hasil produksinya maupun tercipta perusahaan baru yang mana tenaga kerja semakin banyak dibutuhkan sehingga lapangan kerja menjadi terbuka lebar yang pada akhirnya akan dapat menyerap tenaga kerja sehingga akan meningkatkan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Peberbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Artana Yasa, I Komang Oka. 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali*. Skripsi. Universitas Udayana. Bali.
- Ayu Savitri Gama. 2007. *Disparitas dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Antar Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan*. Skripsi Untuk Meraih Gelar Sarjana. Universita Hasanuddin. Makassar.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. *Lampung Dalam Angka 2014*. Provinsi Lampung
- Daryanto Arief dan Yundy Hafizrianda. 2010. *Model model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press
- Dinas Ketenagakerjaan (Disnakers). 2014. Provinsi Lampung.
- Elizabeth A. Stanton. 2007. The Human Development Index: A History. *Working Paper Global Development and Environment Institute Tufts University*. No. 127.
- Fleisher B, Haizheng Li, dan Min Qiang Zhao. 2009. Human capital, economic growth, and regional inequality in China. *Journal of Development Economics, Department of Economics, Ohio State University, Columbus, OH 43210, United States*. No 17.
- Ginting,Charisma K.S. 2006. *Pembangunan Manusia Di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jurnal : Universitas Sumatera Utara.
- Grubel, Harbert. 1998. Economic Freedom and Human Welfare: Some Empirical Findings. *Journal of Simon Fraser University*. Vol 2: hal, 287-304.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar* (Terjemahan Sumarno Zain). Jakarta.

- Hartono, Budiantoro.2008. Analisi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lilis Setyowati dan Yohana Kus Suparwati.2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jawa Tengah. 9 (1),h: 113-133.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, EDAJ. Vol 1: hal, 1-15.
- Mudrajad, Kuncoro, 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Nur, Syafi'i. 2011. *Adakah Anomali Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja?*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Patta, Devyanti. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010. *Skripsi* Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin, Makassar
- Pambudi, Eko Wicaksono. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Studi kasus: Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi* Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pressman, Steven, 2000, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia, Terjemahan Edisi Pertama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ranis, Gustav. 2004. Human Development and Economic Growth. *Center Discussion Paper of Yale University*. No 887.
- Rahadian, Fahmi. 2012. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Universitas Pasundan. Bandung.
- Rastiwa, Mahesa Eka 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar*. E-Jurnal EP Unud, 2(3), pp:119-128
- Safitri, Nanik. 2013. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). Skripsi. Universitas Jember. Jawa Timur.

- Sakamoto, Hiroshi. 2006. Regional Disparity in Indonesia: An Analysis using the Distribution Approach. *The International Centre for the Study of East Asian Development, Kitakyushu (ICSEAD)*. Japan.
- Sasana, Hadi. 2009. Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol 1: hal, 50-69.
- Santika, Lilya. 2014. Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 3 (3), pp:106-114.
- Savitri, Ayu. 2008. *Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi dan Sosial, INPUT. Vol 1: hal, 38-48.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiawati, Rini. 2012. *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia*. Skripsi. Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Tabassum, Amina. 2004. Economic Growth and Income Inequality Relationship: Role of Credit Market Imperfection. *Journal Department of Economics, Quaid-i-Azam University*. Islamabad.
- Thornton, John. 2006. Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered. *Journal of Urban Economics (Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, NW, Washington DC, USA)*. Vol 6: hal, 64-70.
- Todaro, Michael P. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Universitas Lampung, 2005. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- United Nations Development Programme (UNDP), 1995. *Human Development Report*, Oxford University Press. New York.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.